

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam upaya mencapai keberhasilan penggunaan anggaran negara, pemerintah wajib mengelola APBN dengan baik secara efisien, efektif, transparan, dan ekonomis. Dalam penerapan suatu sistem pemerintahan, pemerintah harus menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan *legitimate* sehingga pemerintah dapat mempertanggungjawabkan tugasnya dengan baik dan bersih. Pemerintah mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan dengan kesinambungan yang begitu jelas. Hal-hal penting yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah mengelola aset dan keuangan negara serta mempertanggungjawabkan ke dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat.

Sebelumnya pemerintah masih melakukan upaya pengelolaan aset secara manual, sehingga hal tersebut membuat resiko terjadinya sebuah kesalahan dalam pencatatan inventarisasi dan perhitungan aset dalam laporan keuangan semakin besar. Oleh karena itu, mengingat pentingnya peranan laporan keuangan dalam menyajikan informasi terkait pelaksanaan APBN/APBD yang tentunya akan mempengaruhi kebijakan fiskal maupun moneter, Menteri Keuangan selaku pemegang kekuasaan fiskal menunjuk Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPB) sebagai pembuat dan Pembina Sistem Akuntansi Pemerintah (SiAP). Sebagai bentuk pelaksanaan tugas pembuat dan Pembina sistem, DJPB membuat berbagai peraturan dan aplikasi komputer yang digunakan oleh seluruh instansi pemerintahan di semua level.

Seiring pesatnya perkembangan teknologi, pemerintah juga membuat kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang di dalamnya terdapat pengaturan prinsip-prinsip penyelenggaraan SPBE untuk kegiatan administrasi pemerintahan maupun sistem layanan publik dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan juga keamanan. Maka

dari itu untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan memantau kinerja pemerintah, sejak 2003, Deputi Pengawasan Bidang Keuangan Daerah berusaha untuk mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) telah dikembangkan oleh pemerintah melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan suatu sistem informasi elektronik yang dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan juga kinerja daerah. Adapun manfaat dan keunggulan dari penggunaan SIMDA yaitu sesuai dengan perundang-undangan, terintegrasi dan berbagi data, *transfer of knowledge*, kesinambungan pemeliharaan, mudah digunakan, dan pengawasan yang berkelanjutan. Dalam Pemerintah Daerah, SIMDA ini mempunyai beberapa program. Salah satu program SIMDA yang dikembangkan untuk mengelola aset daerah adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD).

Program aplikasi SIMDA BMD ini telah diimplementasikan di beberapa daerah, yaitu sebanyak 403 pemerintah daerah dari 542 pemerintah daerah yang ada (bpkp.go.id). Berdasarkan data tersebut, pemerintah Kota Bekasi termasuk yang sudah mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) dalam mengelola aset daerah di Kota Bekasi.

Selanjutnya, berdasarkan Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Indikator Kinerja Utama, yang jika dikaitkan dengan capaian Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kota Bekasi mendapat Opini (Wajar Tanpa Pengecualian) WTP sebesar (100%) dari target Opini WTP sebesar (100%), atau dengan kata lain capaian kinerja pemerintah Kota Bekasi sebesar 76.89 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 33.73 persen, karena meskipun terdapat sisa anggaran tetapi capaian kinerja terlampaui dan ini dapat juga diartikan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi dapat

mempertahankan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya (LKIP, 2020). Namun, dalam laporan tersebut terdapat permasalahan yang harus ditingkatkan pengelolaannya, yaitu berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah di Kota Bekasi.

Tabel 1. 1
Data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2018 – 2020

Tahun	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja dan Anggaran	
				Kinerja (%)	Anggaran (%)
2020	Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp 100.000.000	Rp 30.050.000	-	30.05
	Pengelolaan Data Aset Simda BMD	Rp 133.800.000	Rp 5.900.000	-	4.41
2019	Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp 200.000.000	Rp 16.000.000		8
	Pengelolaan Data Aset SIMDA BMD	-	-	-	-
2018	Pengadaan Sarana Untuk Pengelola BMD	-	-	-	-
	Pendampingan Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 400.000.000	Rp 259.331.000	-	64.83

Sumber: (LKIP 2018-2020)

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terdapat target yang tidak tercapai, yaitu Penghapusan Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Data Aset SIMDA BMD. Akan tetapi dalam laporan keuangan Kota Bekasi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meskipun terdapat sisa anggaran tetapi capaian kinerja terlampaui dan dapat juga diartikan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi dapat mempertahankan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya. Namun akan lebih baik apabila optimalisasi anggaran diatas 95%.

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut pemerintahan Kota Bekasi saat ini menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan aset daerah dengan menggunakan teknologi yang handal dan komprehensif untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Oleh karena itu digunakan SIMDA BMD yang merupakan

langkah untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pengelolaan barang milik daerah di pemerintahan Kota Bekasi.

Kota Bekasi termasuk ke dalam daerah yang telah menggunakan SIMDA BMD untuk pengelolaan aset daerah. Penggunaan SIMDA BMD juga sebagai upaya pemerintahan daerah untuk mencapai target pada penatausahaan barang milik daerah atau aset daerah. Keberhasilan penggunaan sistem informasi pada organisasi dapat diukur dari kemudahan dalam penggunaannya dalam mengenali data, mengakses data, dan mengklarifikasi data. Data yang di input pada sistem informasi sudah semestinya data yang sudah tergabung oleh semua instansi terkait agar bisa bermanfaat sebagai kebutuhan oleh organisasi dengan baik.

Sebelumnya juga terdapat penelitian mengenai SIMDA BMD Kabupaten Bekasi yang dikelola oleh BPKD Kabupaten Bekasi yang dimana menunjukkan hasil bahwa SIMDA BMD memiliki kualitas sistem yang cukup berhasil karena mudah digunakan dan informasi yang dihasilkan juga dipakai untuk pengambilan keputusan sehingga BPKD Kabupaten Bekasi menggunakan aplikasi ini untuk pengambilan suatu keputusan (Yuliantika, 2021c).

Berdasarkan uraian data diatas dan analisis yang dilakukan peneliti, karena masih terdapat kurang optimalnya realisasi anggaran terkhusus untuk Pengelolaan Data Aset SIMDA BMD yaitu hanya terealisasi sebesar 4.41% yang dapat menjadi faktor penghambat keberhasilan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah dan juga masih sedikit penelitian tentang pengevaluasian SIMDA BMD di BPKAD Kota Bekasi, maka peneliti memutuskan untuk mengambil judul penelitian **“Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) dalam Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Bekasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana efektivitas penggunaan SIMDA BMD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan peneliti sebagai upaya untuk menghindari adanya penyimpangan atau pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan penulis dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian ini tersampaikan dengan baik dan jelas. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Luas lingkup hanya SIMDA BMD yang dikelola oleh BPKAD Kota Bekasi.
- 2) Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) dalam pengelolaan aset daerah Kota Bekasi menggunakan pendekatan teori Delone & Mclean yang dimana terdapat 6 model, yaitu: kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan

- 1) Untuk mengetahui efektivitas penggunaan SIMDA BMD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Praktis

- a. Manfaat untuk peneliti, untuk lebih memahami dan mengembangkan konsep ilmu administrasi publik, terutama yang berkaitan dengan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) dan menjadi bahan informasi untuk permasalahan yang diteliti.
- b. Pada Institusi Universitas Islam 45 Bekasi, diharapkan penelitian ini menambah wawasan kajian mengenai administrasi publik.

2) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan teori pengelolaan aset daerah terutama dalam aspek penggunaan sistem informasi manajemen pengelolaan aset daerah Kota Bekasi.